

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BAPPEDA TAHUN 2014

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT kami panjatkan, karena berkat rahmat dan hidayahNya maka kami dapat menyelesaikan tugas dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014.

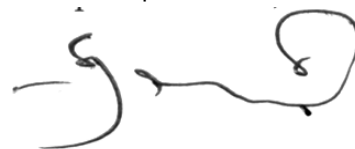
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menuntut pemerintah untuk lebih terbuka dalam melakukan pertanggungjawaban kegiatannya kepada publik, Sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur telah menyusun LKjIP BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014.

Laporan ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan secara garis besar mengungkap tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dijadikan pedoman/arah bagi seluruh komponen Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, kemudian hasil-hasil yang diperoleh selama tahun anggaran 2014, serta analisis pencapaian kinerja berupa analisis keberhasilan ataupun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014.

Dengan segala keterbatasan, Laporan ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Besar harapan kami LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Sangatta, 2 Maret 2015  
Kepala Badan,



**Ir. Suprihanto, CES**  
NIP. 19620428 199303 1 003

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 20 November 2014. Pedoman ini dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 menggambarkan kinerja sasaran yang akan dicapai selama dari kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk Tahun 2014 terdapat 48 Kegiatan, dalam 10 Program dan 13 Indikator Kinerja yang merupakan bagian dari 6 Sasaran Strategis.

Berdasarkan analisis capaian kinerja target dan realisasi tahun 2014 mencapai nilai rata-rata **96,7%**. Menurut standart Lembaga Administrasi Negara (LAN) nilai capaian Kinerja Sasarannya termasuk dalam kategori **“AA (Memuaskan)”**. sedangkan berdasarkan realisasi anggaran BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur tahun 2014 dengan rata-rata realisasi keuangan **89,88 %**.

# DAFTAR ISI

	<i>Hal.</i>
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	<b>I – 1</b>
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Dasar Pembentukan Organisasi	I – 1
1.3. Aspek Strategis Organisasi	I – 1
1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	I – 2
1.5. Struktur Organisasi	I – 3
1.6. Sumber Daya Manusia	I – 5
1.7. Sistematisasi Penyanjian	I – 6
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>II – 1</b>
2.1. Rencana Strategis	II – 1
2.2. Visi dan Misi Bappeda	II – 1
2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda	II – 3
2.4. Indikator Kinerja	II – 4
2.5. Strategi dan Kebijakan Bappeda	II – 8
2.6. Program Prioritas Bappeda Tahun 2014	II – 12
2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2014	II – 13
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>III – 1</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III – 1
3.2. Analisis Capaian Kinerja	III – 3
3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Target dan Realisasi Tahun 2014	III – 3
3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Beberapa Tahun Terakhir	III – 5
3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Renstra SKPD	III – 7

---

3.3.	Pencapaian Kinerja Lainnya	III – 7
3.4.	Realisasi Anggaran	III – 7
BAB IV	PENUTUP	IV – 1
4.1.	Kesimpulan	IV – 1
4.2.	Saran	IV – 1
LAMPIRAN		

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/terget kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## 1.2. Dasar Pembentukan Organisasi

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya di Kabupaten Kutai Timur.

## 1.3. Aspek Strategis Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disamping tugas dan fungsinya sebagai bidang perencanaan pembangunan daerah, urusan lainnya yang ditangani berdasarkan peraturan perundangan seperti antara lain:

- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- Pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan pertanggungjawaban kepala daerah;
- Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);

- Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten, dan
- Bidang-bidang strategis penyelenggaraan pemerintah daerah lainnya.

Berdasarkan ruang lingkup tugas (*scope of work*) di atas, maka BAPPEDA memiliki peran yang strategis dalam pembangunan daerah, yaitu :

1. Pengambilan keputusan alokasi sumber daya pembangunan
2. *Think tank* (menyusun perencanaan pembangunan daerah)
3. Koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah
4. Administrator dalam pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah.

Peran utama BAPPEDA dalam pembangunan daerah dapat dijabarkan secara lebih eksplisit sebagaimana terlihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Peran BAPPEDA dalam Pembangunan Daerah**

PERAN UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Pengambilan Keputusan Alokasi Sumberdaya Pembangunan	Think Tank	Koordinator	Administrator
<b>PENJABARAN :</b> 1. Perencanaan 2. Penganggaran 3. Penanganan masalah mendesak dan berskala daerah/kabupaten	<b>PENJABARAN :</b> 1. <i>Knowledge acquisition</i> 2. <i>Knowledge distribution</i> 3. <i>Knowledge application</i> 4. Perencana kebijakan pemerintah daerah 5. Perancang pergeseran peran dari pemerintah ke swasta atau sebaliknya	<b>PENJABARAN :</b> 1. Antar instansi pemerintah 2. Antara pemerintah dengan swasta/masyarakat (fasilitator, hub, penghubung)	<b>PENJABARAN :</b> 1. Pengelolaan proses perencanaan 2. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah

#### 1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya di Kabupaten Kutai Timur, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang dipimpin oleh Ketua Badan yang **berkedudukan** dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bappeda mempunyai **tugas** melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bappeda menyelenggarakan **fungsi**:

- a. Perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.5. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Ketua, Sekretariat, Bidang Pendataan dan Pelaporan, Bidang Sosial Budaya, Mental dan Spiritual, Bidang Ekonomi, serta Bidang Fisik dan Prasarana.

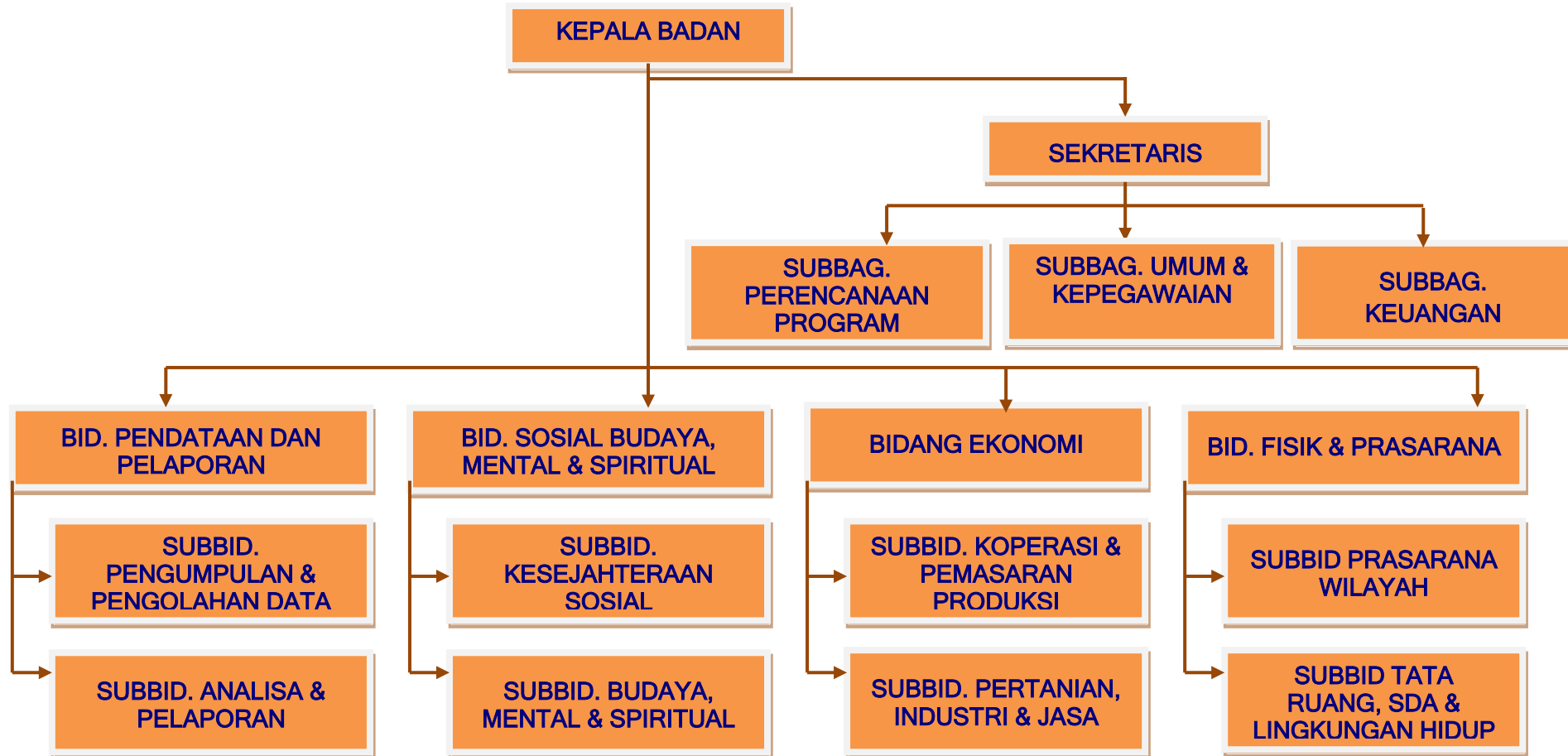
Adapun secara rinci susunan organisasi tersebut sebagai berikut :

1. Ketua Badan;
2. Sekretariat membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pendataan dan Pelaporan membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data
  - b. Sub Bidang Analisa dan Pelaporan
4. Bidang Sosial Budaya, Mental dan Spiritual membawahi :
  - a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
  - b. Sub Bidang Budaya, Mental dan Spiritual
5. Bidang Ekonomi membawahi :
  - a. Sub Bidang Koperasi dan Pemasaran Produksi
  - b. Sub Bidang Pertanian, Industri dan Jasa
6. Bidang Fisik dan Prasarana membawahi :
  - a. Sub Bidang Prasarana Wilayah
  - b. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013

### 1.6. Sumber Daya Manusia

Secara umum jumlah pegawai PNS dan TK2D di Bappeda Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2014 berjumlah 111 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 68 orang dan Pegawai TK2D sebanyak 43 orang. Gambaran komposisi aparatur menurut pendidikan dan kepangkatan secara rinci dapat dilihat dalam tabel 1.2 – 1.4.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV b	3 orang
2	Golongan IV a	2 orang
3	Golongan III d	8 orang
4	Golongan III c	3 orang
5	Golongan III b	16 orang
6	Golongan III a	17 orang
7	Golongan II b	18 orang
8	Golongan I a	1 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>68 orang</b>

Sumber : Data Pegawai Bappeda Tahun 2014

**Tabel 1.3**  
**Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah
1	Pendidikan S 2	8 orang
2	Pendidikan S 1	40 orang
3	Pendidikan D 3	1 orang
4	Pendidikan SLTA	18 orang
5	Pendidikan SD	1 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>68 orang</b>

Sumber : Data Pegawai Bappeda Tahun 2014

**Tabel 1.4**  
**Jumlah TK2D berdasarkan Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah
1	Pendidikan S 1	20 orang
2	Pendidikan D 1	1 orang
3	Pendidikan SLTA	19 orang
4	Pendidikan SLTP	2 orang
5	Pendidikan SD	1 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>43 orang</b>

Sumber : Data Pegawai Bappeda Tahun 2014

### 1.7. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini memuat ringkasan (ikhtisar) perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menguraikan tentang subbab Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Pada subbab Capaian Kinerja Organisasi menguraikan tentang capaian organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja. Sedangkan pada subbab Realisasi Anggaran menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### **BAB IV. PENUTUP.**

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN.**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Renstra SKPD menjadi 'Instrumen Penting' pembangunan daerah karena memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah. Renstra SKPD merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) atau rencana pembangunan tahunan (*annual plan*). Selanjutnya, dari sisi substansi isi maka Renstra SKPD pada dasarnya merupakan **operasionalisasi** RPJMD. Dengan demikian maka Renstra SKPD memiliki kedudukan penting dalam pembangunan daerah, disamping kewajiban bagi semua SKPD dalam pelaksanaan amanat peraturan perundangan.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (RENSTRA BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2011-2015.

Dalam sistem Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan Rencana Kerja dalam kurun lima tahun kedepan yang harus dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Timur agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas, Sinergis Bappeda Kabupaten Kutai Timur lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

### 2.2. Visi dan Misi Bappeda

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 adalah : *“Terwujudnya Lembaga Perencanaan yang Kapabel, Kredibel dan Akuntabel.”*

Makna dari Visi diatas adalah :

Proses perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata kapabel, kredibel dan akuntabel adalah sebagai berikut :

**Kapabel** : Memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai.

**Kredibel** : Menerapkan prinsip-prinsip good governance, yang meliputi antara lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas.

**Akuntabel** : Hasil perencanaan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan secara jelas sebagai pengendalian dan evaluasi.

Untuk menjabarkan lebih lanjut visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) diatas, maka disusun misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemampuan sumber daya dan profesionalisme aparatur perencana.
2. Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan dan rencana pembangunan Kabupaten Kutai Timur.
3. Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Makna dari Misi Bappeda diatas adalah :

Untuk mencapai Visi BAPPEDA, yaitu: "Terwujudnya lembaga perencanaan yang kapabel, kredibel dan akuntabel," maka diperlukan misi yang merupakan langkah utama yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur yang mempunyai peran sebagai pengambil keputusan yang menghasilkan produk-produk perencanaan. Dengan demikian maka diperlukan sumber daya manusia yang handal dan profesional dalam perencanaan guna menghasilkan produk yang berkualitas, sesuai dengan Misi pertama.

Misi Kedua ini merupakan pelaksanaan peran BAPPEDA sebagai koordinator, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan pelaksanaan koordinasi yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik antar instansi pemerintah maupun antara pemerintah dengan swasta/ masyarakat. Sedangkan Misi Ketiga ini merupakan pelaksanaan peran sebagai *think tank* yang strategis, mengingat hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Kutai Timur, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.

### 2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun Tujuan Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme aparatur Bappeda dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan.
2. Mengembangkan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk-produk perencanaan dan penganggaran.
5. Mengembangkan dan memantapkan Sistem Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsive.
6. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem pelaporan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA sebagai berikut :

1. Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang professional dalam menyusun produk-produk perencanaan pembangunan.
2. Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan.
3. Terwujudnya efektivitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana.
4. Tersedianya produk perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan.
5. Terwujudnya pengembangan dan pemantapan Sistem Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsif.
6. Terlaksananya sistem pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang ditentukan.

**Tabel 2.1.**  
**Pengelompokan Misi, Tujuan dan Sasaran**

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mengembangkan kemampuan sumber daya dan profesionalisme aparatur perencana	Meningkatkan Profesionalisme aparatur Bappeda dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan	Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang professional dalam menyusun produk-produk perencanaan pembangunan
2	Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan dan rencana pembangunan Kabupaten Kutai Timur	1. Mengembangkan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan	1. Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan
		2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk-produk perencanaan dan penganggaran	2. Tersedianya produk perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan
		3. Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah	3. Terwujudnya efektifitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana
3	Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Kutai Timur	1. Mengembangkan dan memantapkan Sistem Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsive	1. Terwujudnya pengembangan dan pemantapan Sistem Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsif
		2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem pelaporan	2. Terlaksananya sistem pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang ditentukan

Sumber : Renstra Bappeda Kab. Kutai Timur 2011-2015

#### 2.4. Indikator Kinerja

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik, secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan

tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Adapun syarat indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas (*Specific*)

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan atau program dan tidak berdwimakna .

2. Dapat diukur secara obyektif (*Measurabel*)

Indikator kinerja dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Jika ada dua pihak atau lebih yang mengukur dengan indikator kinerja yang bersangkutan mempunyai kesimpulan yang sama.

3. Dapat dicapai (*Attainabel*)

Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan sesuatu kinerja yang akan dapat dicapai oleh organisasi. Sehingga dalam penetapan indikator kinerja perlu mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat *controllable* dan *uncontrollable* bagi organisasi.

4. Terkait pada hasil (*Relevance*)

Indikator kinerja harus terkait dengan apa yang akan diukur.

5. Untuk kurun waktu tertentu (*Time bound*)

Indikator kinerja yang ditetapkan dapat menggambarkan sesuatu kinerja dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Indikator kinerja BAPPEDA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2

## Indikator Kinerja BAPPEDA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang professional dalam menyusun produk-produk perencanaan pembangunan	1. Peningkatan jumlah tenaga planner dan skill yang ahli di BAPPEDA	6 orang	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	15 orang	16 orang	16 orang
2	2.1 Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan	1. Persentase data informasi untuk pelaporan kinerja pemerintah	82.8 %	95 %	95 %	95 %	96 %	96 %	96 %	96 %
		2. Tersedianya data informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan (KDA, PDRB, SIMREDA, dll)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	2.2.Tersedianya produk perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan	1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD								
		a. RPJPD	-	-	-	-	-	-	-	-
		b. RPJMD	-	Ada	-	-	-	-	Ada	Ada
		c. RENSTRA SKPD	-	Ada	-	-	-	-	Ada	Ada
		d. RENSTRA SKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		e. RENJA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
f. RKA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
	2. Persentase jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	15 %	10 %	10 %	10 %	9 %	9 %	9 %	9 %	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		3. Persentase jumlah program RENJA yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD	20 %	10 %	10 %	10 %	9 %	9 %	9 %	9 %
		4. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		5. Jumlah produk rencana yang disusun	50 jenis dok	58 jenis dok	65 jenis dok	72 jenis dok	78 jenis dok	85 jenis dok	90 jenis dok	90 jenis dok
	2.3. Terwujudnya efektifitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana	1. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi								
		a. Rakor Fispra	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
		b. Rakor Ekonomi	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
		c. Rakor Sosial Budaya	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
		d. Rakor Pendataan Pelaporan	-	3 kali	3 kali	3 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
		2. Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan
3	3.1. Terwujudnya pengembangan dan pemantapan Sistem Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsive	1. Frekwensi monitoring dan pengendalian	72,5 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Tahapan Proses perencanaan pembangunan daerah								
		• Forum Gab. SKPD	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan
		• Musrenbang Kab.	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan
	3.2. Terlaksananya sistem pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang ditentukan	1. Tersedianya dokumen laporan								
		• LKPJ	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		• LAKIP Bappeda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		• LAKIP Pemkab Kutim	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

Sumber : Renstra Bappeda Kab. Kutai Timur 2011-2015

## 2.5. Strategi dan Kebijakan Bappeda

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bappeda bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda**

**VISI** : Terwujudnya Lembaga Perencanaan Yang Kapabel, Kredibel, dan Akuntabel

**MISI I** : Mengembangkan kemampuan sumber daya dan profesionalisme aparatur perencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur BAPPEDA dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan	1. Terealisasi aparatur perencanaan pembangunan yang profesional dalam menyusun produk-produk perencanaan pembangunan	1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM perencana dan tenaga skill secara lebih proporsional	1. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
		2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai	2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk memperlancar dan meningkatkan kinerja aparatur baik bersifat teknis maupun pelayanan umum
		3. Mengembangkan sistem informasi yang dapat mendukung efektifitas pelaksanaan kinerja	3. Penyediaan dan pengembangan system informasi yang berbasis elektronik sesuai karakteristik tugas dan fungsi lembaga
		4. Menata personil pegawai sesuai dengan karakteristik unit kerja internal	4. Penataan personil pegawai sesuai dengan kompetensi
		5. Membangun sistem <i>management</i> kinerja agar optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi	5. Penerapan standart kinerja operasional untuk meningkatkan efektifitas kinerja. 6. Restrukturisasi Organisasi/ Kelembagaan
		6. Meningkatkan hubungan kerja internal yang didukung oleh motivasi dan etos kerja yang tinggi.	7. Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi internal antar unit kerja secara berkala.
		7. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kinerja yang ditandai dengan lebih besarnya volume pelaksanaan pekerjaan di daerah	8. Peningkatan pengendalian pelaksanaan tugas keluar daerah berdasarkan urgensitasnya

**MISI II : Meningkatkan Kualitas Koordinasi Perencanaan dan Rencana Pembangunan Kabupaten Kutai Timur**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mengembangkan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan  2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk-produk perencanaan dan penganggaran  3. Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah	1. Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan  2. Tersedianya produk rencana pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan  3. Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan kebijakan pembangunan serta pelaporan	1. Pemutakhiran dan pengembangan data dasar / statistik daerah berdasarkan potensi dan karakteristik daerah/ wilayah.
		2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.	2. Peningkatan kualitas hasil perencanaan dan evaluasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan, target waktu dan kaidah-kaidah yang berlaku.
		3. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel	3. Peyusunan kegiatan berdasarkan prioritas kebutuhan dan sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan.

**MISI III : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan kabupaten yang dinamis dan responsive	1. Terwujudnya pengembangan dan pemantapan sistem koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kabupaten yang dinamis dan responsif	1. Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi lintas SKPD (lintas sektor) dan antar level pemerintahan	1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan
		2. Mengembangkan sistem regulasi yang bersifat operasional untuk mendukung pelaksanaan kinerja.	2. Pengembangan produk hukum daerah yang bersifat operasional sesuai ruang lingkup/ bidang tugas yang ditangani.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem pelaporan	2. Terlaksananya sistem pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang ditentukan	3. Membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal SKPD ( <i>networking</i> )	3. peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi serta pemantapan dalam membangun komunikasi ( <i>communication building</i> ) baik internal dan eksternal
		4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sistem laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	4. Pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi untuk pelaporan serta pemantapan sistem koordinasi lintas sektor

## 2.6. Program Prioritas Bappeda Tahun 2014

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Pemilihan program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2014**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
1	Meningkatkan profesionalisme aparatur BAPPEDA dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan	Tewujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang professional dalam menyusun produk-produk perencanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> </ol>
2.1	Mengembangkan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan	Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Data/ Informasi</li> <li>2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</li> </ol>
2.2	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk-produk perencanaan dan penganggaran	Tersedianya produk perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</li> <li>3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya</li> <li>4. Program Perencanaan Tata Ruang</li> </ol>
2.3	Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya efektifitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</li> <li>3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya</li> <li>4. Program Perencanaan Tata Ruang</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
3.1	Mengembangkan dan memantapkan Sistem Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsive	Terwujudnya pengembangan dan pemantapan Sistem Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsif	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.2	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem pelaporan	Terlaksananya sistem pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang ditentukan	1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

## 2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2014

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang bersangkutan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2014**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang professional dalam menyusun produk-produk perencanaan pembangunan	1. Peningkatan jumlah tenaga planner dan Skill yang ahli di BAPPEDA	14 orang
2	2.1 Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan	1. Persentase data informasi untuk pelaporan kinerja pemerintah 2. Tersedianya data informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan : # Kutai Timur Dalam Angka (KDA) # Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) # Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA) # Profil Daerah	96 %  Ada Ada Ada Ada
	2.2 Tersedianya produk rencana pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan	1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD : # RKPD # RENJA # RKA 2. Persentase jumlah program RKPD yang <u>tidak diakomodir</u> dalam RENJA SKPD 3. Persentase jumlah program RENJA yang <u>tidak diakomodir</u> dalam RKA SKPD 4. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 5. Jumlah produk rencana yang disusun	 Ada Ada Ada 9 % 9 % 100 % 78 jenis dok.
	2.3 Terwujudnya efektivitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana	1. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi : # Rapat Koordinasi Bidang Fisik Prasarana # Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi # Rapat Koordinasi Bidang Sosial Budaya # Rapat Koordinasi Bidang Pendataan Pelaporan 2. Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah	 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali Dilaksanakan
3	3.1 Terwujudnya pengembangan dan pematapan Sistem Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsif	1. Frekwensi monitoring dan pengendalian 2. Tahapan Proses perencanaan pembangunan daerah : # Forum Gab. SKPD # Musrenbang Kab.	100 %  Dilaksanakan Dilaksanakan
	3.2 Terlaksananya sistem pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang ditentukan	1. Tersedianya dokumen laporan : # LKPJ # Lakip Bappeda # Lakip Pemkab Kutim	 Ada Ada Ada

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memuat Sasaran Strategis Renstra SKPD, Indikator Kinerja, Satuan, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Tahun 2014. Capaian Kinerja Bappeda dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

**Tabel 3.1.**

Tabel Interpretasi atas Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan serta Indikator Makro

No	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 85 - 100	Memuaskan
2	A	> 75 - 85	Sangat Baik
3	B	> 65 - 75	Baik
4	CC	> 50 - 65	Cukup Baik
5	C	> 30 - 50	Agak Kurang
6	D	0 - 30	Kurang

Tabel 3.2.  
Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang professional dalam menyusun produk-produk perencanaan pembangunan	1. Peningkatan jumlah tenaga planner dan Skill yang ahli di BAPPEDA	14 orang	31 orang	100
2	2.1 Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan	1. Persentase data informasi untuk pelaporan kinerja pemerintah 2. Tersedianya data informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan :	96 %	100 %	100
		# Kutai Timur Dalam Angka (KDA)	Ada	Ada	100
		# Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Ada	Ada	100
		# Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA)	Ada	Ada	100
		# Profil Daerah	Ada	Ada	100
	2.2 Tersedianya produk perencana pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan	1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD :			
		# RKPJ	Ada	Ada	100
		# RENJA	Ada	Ada	100
		# RKA	Ada	Ada	100
		2. Persentase jumlah program RKPJ yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	9 %	0 %	100
		3. Persentase jumlah program RENJA yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD	9 %	10 %	99
		4. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPJ	100 %	77 %	77
		5. Jumlah produk rencana yang disusun	78 jenis dok.	110 jenis dok.	100
			(Tahun 2013 = 96 jenis dok)	(Tahun 2014 = 14 jenis dok)	
	2.3 Terwujudnya efektivitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana	1. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi :			
		# Rapat Koordinasi Bidang Fisik Prasarana	4 kali	17 kali	100
		# Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi	4 kali	5 kali	100
		# Rapat Koordinasi Bidang Sosial Budaya	4 kali	8 kali	100
		# Rapat Koordinasi Bidang Pendataan Pelaporan	4 kali	8 kali	100
		2. Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah	Dilaksanakan	Dilaksanakan	100
3	3.1 Terwujudnya pengembangan dan pematapan Sistem Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsif	1. Frekuensi monitoring dan pengendalian 2. Tahapan Proses perencanaan pembangunan daerah :	100 %	45 %	45
		# Forum Gab. SKPD	Dilaksanakan	Dilaksanakan	100
		# Musrenbang Kab.	Dilaksanakan	Dilaksanakan	100
	3.2 Terlaksananya sistem pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang ditentukan	1. Tersedianya dokumen laporan :			
		# LKPD	Ada	Ada	100
		# Lakip Bappeda	Ada	Ada	100
		# Lakip Pemkab Kutim	Ada	Ada	100
	Rata-Rata				96,7

## 3.2. Analisis Capaian Kinerja

### 3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Target dan Realisasi Tahun 2014

Analisis Capaian Kinerja antara Target dan Realisasi Bappeda Kinerja Tahun 2014, pada Tabel 3.2, terhadap 6 (enam) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), rata-rata capaian kinerjanya sebesar **96,70%** dengan Interpretasi **"Memuaskan"**. Dari 13 (tigabelas) IKU ada 11 (sebelas) IKU yang telah mempunyai tingkat capaian rata-rata antara > 85 – 100 dengan kategori **"Memuaskan"**.

Untuk Indikator Kinerja "Frekuensi Monitoring dan Pengendalian" mempunyai tingkat capaian 45%, hal ini dikarenakan hal ini dapat terlihat dari realisasi di tahun 2014 sebesar 45%, sedangkan target di akhir Renstra Bappeda Tahun 2015 sebesar 100%, penyebabnya dikarenakan adanya pergantian PA, KPA dan PPTK, sehingga dalam pelaksanaan monitoring dan pengendalian yang seharusnya dilakukan di 18 kecamatan tidak terlaksana sepenuhnya.

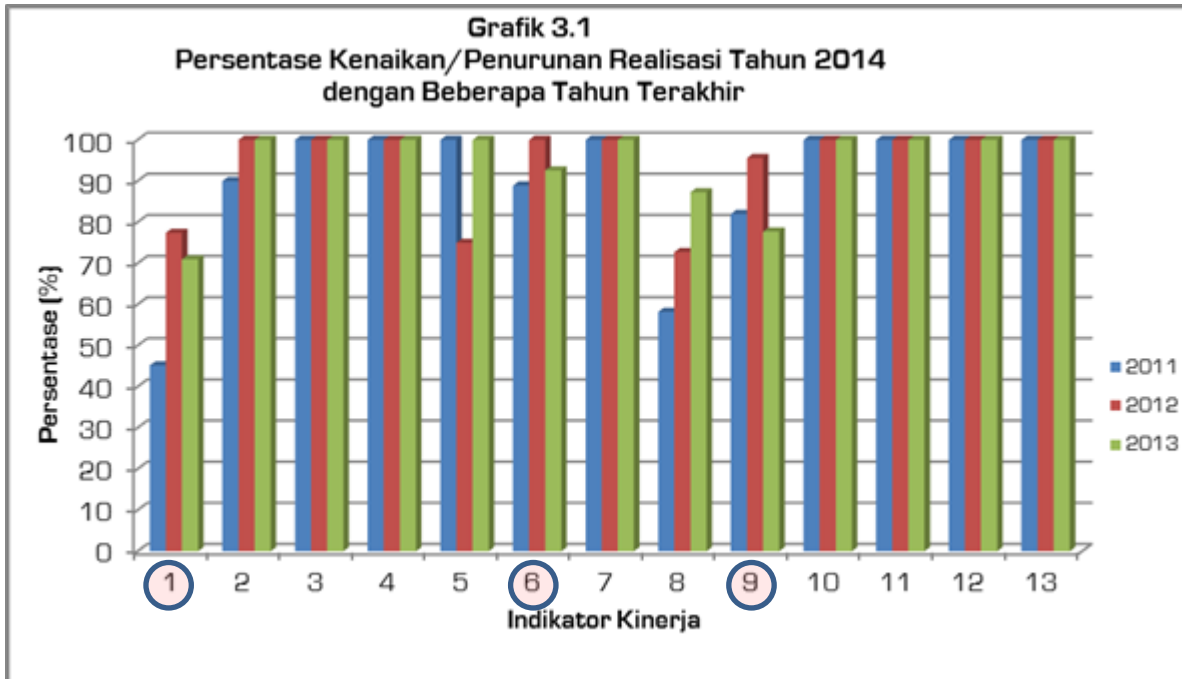
Tabel 3.3.  
Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun Lalu -			Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi Tahun 2014 Terhadap Tahun -		
					2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang professional dalam menyusun produk – produk perencanaan pembangunan	1. Peningkatan jumlah tenaga planner dan Skill yang ahli di BAPPEDA	orang	31	14	24	22	45	77	71
2	2.1 Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan	1. Persentase data informasi untuk pelaporan kinerja pemerintah 2. Tersedianya data informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan :	%	100	90	100	100	90	100	100
		# Kutai Timur Dalam Angka (KDA)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100
		# Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100
		# Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100
		# Profil Daerah	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100
	2.2 Tersedianya produk rencana pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan	1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD :								
		# RKPJ	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100
		# RENJA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100
		# RKA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100
		2. Persentase jumlah program RKPJ yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	%	0	0	25	0	100	75	100
		3. Persentase jumlah program RENJA yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD	%	10	20	7	17	89	100	93
		4. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPJ	%	77	100	83	98	100	100	100
		5. Jumlah produk rencana yang disusun	jenis dok.	110	64	80	96	58	73	87
2.3	Terwujudnya efektivitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana	1. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi :								
		# Rapat Koordinasi Bidang Fisik Prasarana	kali	17	9	14	15	53	82	88
		# Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi	kali	5	6	6	3	100	100	60
		# Rapat Koordinasi Bidang Sosial Budaya	kali	8	12	19	5	100	100	63
		# Rapat Koordinasi Bidang Pendataan Pelaporan	kali	8	6	18	12	75	100	100
		2. Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah	Dilaksanakan / Tidak	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	100	100	100
3	3.1 Terwujudnya pengembangan dan pemantapan Sistem Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsif	1. Frekuensi monitoring dan pengendalian 2. Tahapan Proses perencanaan pembangunan daerah :	%	45	95	62	47	100	100	100
		# Forum Gab. SKPD	Dilaksanakan / Tidak	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	100	100	100
		# Musrenbang Kab.	Dilaksanakan / Tidak	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	100	100	100
	3.2 Terlaksananya sistem pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang ditentukan	1. Tersedianya dokumen laporan :								
		# LKPJ	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100
		# Lakip Bappeda	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100
		# Lakip Pemkab Kutim	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100
	<b>Rata-Rata</b>							<b>92,09</b>	<b>96,15</b>	<b>94,23</b>

### 3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Analisis capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya terhadap capaian tahun 2014, menunjukkan persentase kenaikan capaian dari 13 Indikator Kinerja, hanya 3 Indikator Kinerja yang mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tabel 3.3.

Persentase rata-rata kenaikan dari tahun 2011 ke 2012 sebesar 4,4% sedangkan presentase rata-rata penurunan dari tahun 2012 ke 2013 mengalami penurunan sebesar 1,9%.



**Keterangan Nomor Indikator Kinerja:**

1. Peningkatan jumlah tenaga planner dan skill yang ahli di Bappeda
2. Persentase data informasi untuk pelepasan kinerja pemerintah
3. Tersedianya data informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan
4. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD
5. Persentase jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam Renja SKPD
6. Persentase jumlah program Renja yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD
7. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD
8. Jumlah produk rencana yang disusun
9. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi
10. Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah
11. Frekuensi monitoring dan pengendalian
12. Tahapan proses perencanaan daerah
13. Tersedianya dokumen laporan


Tabel 3.4.  
Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan RENSTRA SKPD


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2014	Target Renstra Tahun -			Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun -			Notifikasi
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang profesional dalam menyusun produk-produk perencanaan pembangunan	1. Peningkatan jumlah tenaga planner dan Skill yang ahli di BAPPEDA	orang	31	14	15	16	100	100	100	
2	2.1 Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan	1. Persentase data informasi untuk pelaporan kinerja pemerintah 2. Tersedianya data informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan : # Kutai Timur Dalam Angka (KDA) # Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) # Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA) # Profil Daerah	% Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak	100 Ada Ada Ada Ada	96 Ada Ada Ada Ada	96 Ada Ada Ada Ada	96 Ada Ada Ada Ada	100 100 100 100 100	100 100 100 100 100	100 100 100 100 100	    
	2.2 Tersedianya produk perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan	1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD : # RKP # RENJA # RKA 2. Persentase jumlah program RKP yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD 3. Persentase jumlah program RENJA yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD 4. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKP 5. Jumlah produk rencana yang disusun	% Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak % % %	 Ada Ada Ada 0 10 77 110	 Ada Ada Ada 9 9 100 100 85	 Ada Ada Ada 9 9 100 100 85	 Ada Ada Ada 9 9 100 100 90	 100 100 100 100 99 77 100	 100 100 100 100 99 77 100	 100 100 100 100 99 77 100	      
	2.3 Terwujudnya efektivitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana	1. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi : # Rapat Koordinasi Bidang Fisik Prasarana # Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi # Rapat Koordinasi Bidang Sosial Budaya # Rapat Koordinasi Bidang Pendataan Pelaporan 2. Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah	kali kali kali kali Dilaksanakan/ Tidak	17 5 8 8 Dilaksanakan	4 4 4 4 Dilaksanakan	4 4 4 4 Dilaksanakan	4 4 4 4 Dilaksanakan	100 100 100 100 100	100 100 100 100 100	100 100 100 100 100	    
3	3.1 Terwujudnya pengembangan dan pemantapan Sistem Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsif	1. Frekuensi monitoring dan pengendalian 2. Tahapan Proses perencanaan pembangunan daerah : # Forum Gab. SKPD # Musrenbang Kab.	% Dilaksanakan/ Tidak Dilaksanakan/ Tidak	45 Dilaksanakan Dilaksanakan	100 Dilaksanakan Dilaksanakan	100 Dilaksanakan Dilaksanakan	100 Dilaksanakan Dilaksanakan	45 100 100	45 100 100	45 100 100	  
	3.2 Terlaksananya sistem pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang ditentukan	1. Tersedianya dokumen laporan : # LKPJ # Lakip Bappeda # Lakip Pemkab Kutim	Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak	Ada Ada Ada	Ada Ada Ada	Ada Ada Ada	Ada Ada Ada	100 100 100	100 100 100	100 100 100	  
	Rata-Rata							96,70	96,70	96,70	

### 3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Renstra SKPD

Capaian kinerja di tahun 2014 rata-rata sebesar 96,70% terhadap Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015. Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Renstra Bappeda dapat dilihat pada Tabel 3.4. Ada 3 indikator kinerja yang belum memenuhi target Renstra, yaitu:

- a. Persentase jumlah program Renja yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD;
- b. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD;
- c. Frekuensi monitoring dan pengendalian.

Untuk indikator kinerja "**Persentase jumlah program Renja yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD**", perkiraan capaian (notifikasi) sudah *on the track*  (lampu hijau), karena sudah mencapai 99%. Begitu juga dengan indikator kinerja "**Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD**", karena sudah mencapai  $\geq 60\%$  dari target akhir Renstra Bappeda.

Persentase yang **Sulit Tercapai**  (lampu merah) adalah indikator kinerja "**frekuensi monitoring dan pengendalian**", hal ini dapat terlihat dari realisasi di tahun 2014 sebesar 45%, sedangkan target di akhir Renstra Bappeda Tahun 2015 sebesar 100%, penyebabnya dikarenakan adanya pergantian PA, KPA dan PPTK, sehingga terlambat dalam pelaksanaan monitoring.

### 3.3. Pencapaian Kinerja Lainnya

Pencapaian Kinerja Bappeda adalah Juara III (tiga) Anugerah Pangripta Nusantara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014. Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara merupakan penghargaan yang bertujuan untuk mendorong setiap daerah kabupaten/kota untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan, serta menciptakan insentif bagi daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan perencanaan yang lebih baik dan bermutu.

### 3.4. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur 2014 sebesar 89,88%, dengan anggaran sebesar Rp 22.888.000.000,-. Akuntabilitas Keuangan terdapat anggaran tiap-tiap kegiatan dan realisasi keuangan serta persentasenya, yang dapat dilihat pada Tabel 3.5.



**Tabel 3.5**  
**Realisasi Keuangan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program / Kegiatan	Anggaran				
				Target	Realisasi	% Capaian		Pagu APBD	Pagu P-APBD	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang profesional dalam menyusun produk-produk perencanaan pembangunan	1. Peningkatan jumlah tenaga planner dan Skill yang ahli di BAPPEDA	orang	14	31	100						
							<b>A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
							1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	198.623.500	243.619.500	198.489.055	81,5	
							2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	973.336.500	973.336.500	871.502.500	89,5	
							3 Penyediaan alat tulis kantor	115.020.000	145.020.000	143.512.000	99,0	
							4 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	280.147.700	394.147.700	388.299.000	98,5	
							5 Penyediaan makanan dan minuman	202.755.000	252.755.000	252.179.100	99,8	
							6 Rapat-repat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	550.551.050	882.117.370	862.395.354	97,8	
							7 Pengelolaan administrasi Keuangan	278.000.000	278.000.000	261.830.200	94,2	
							8 Rapat-repat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	50.000.000	162.000.000	111.435.000	68,8	
							9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	86.000.000	86.000.000	85.617.000	99,6	
							<b>B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
							1 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	547.450.000	743.223.000	659.048.342	88,7	
							2 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	507.245.000	507.245.000	498.019.300	98,2	
							3 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	998.466.750	998.466.750	979.840.000	98,1	
							4 Pengadaan Mebeleur	361.930.000	229.930.000	195.517.500	85,0	
							<b>C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
							1 Pendidikan dan pelatihan Teknis	550.000.000	433.387.200	410.371.400	94,7	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program / Kegiatan	Anggaran			
				Target	Realisasi	% Capaian		Pagu APBD	Pagu P-APBD	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2											
2.1	Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan	1. Persentase data informasi untuk pelaporan kinerja pemerintah	%	96	100	100					
		2. Tersedianya data informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan :									
		# Kutai Timur Dalam Angka (KDA)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	100					
		# Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	100					
		# Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	100					
		# Profil Daerah	Ada/ Tidak	Ada	Ada	100					
							<b>A Program Pengembangan Data/ Informasi</b>				
							1 Penyusunan profil daerah	200.000.000	170.000.000	155.270.500	91,3
							2 Penyusunan data pokok daerah	500.000.000	500.000.000	490.556.855	98,1
							3 Pengembangan sistem Informasi dan Aplikasi	250.000.000	250.000.000	236.903.300	94,8
							4 Updating Data Simreda	350.000.000	350.000.000	339.103.780	96,9
							5 Forum Data Daerah	200.000.000	150.000.000	119.248.960	79,5
							<b>B Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>				
							1 Ekspose Program-program pembangunan	528.474.500	493.548.750	482.558.450	97,8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program / Kegiatan	Anggaran				
				Target	Realisasi	% Capaian		Pagu APBD	Pagu P-APBD	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
2.2	Tersedianya produk perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan	1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD :  # RKPd # RENJA # RKA	Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak	Ada Ada Ada	Ada Ada Ada	100 100 100						
		2. Persentase jumlah program RKPd yang tidak diskomodir dalam RENJA SKPD	%	9	0	100						
		3. Persentase jumlah program RENJA yang tidak diskomodir dalam RKA SKPD	%	9	10	99						
		4. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPd	%	100	77	77						
		5. Jumlah produk rencana yang disusun	jenis dok.	78	110	100						
							<b>A Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
							1 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah	972.000.000	989.243.650	966.482.220	97,7	
							2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	100.000.000	24.391.600	22.198.900	91,0	
							3 Rencana induk sistem pengembangan air minum kabupaten kutai timur	1.000.000.000	1.000.000.000	913.729.291	91,4	
							4 Review rencana program investasi jangka menengah (RPIJM)	350.000.000	350.000.000	233.461.610	66,7	
							<b>B Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>					
							1 Studi perencanaan pasar tradisional di Kabupaten Kutai Timur	500.000.000	500.000.000	443.858.600	88,8	
							2 Analisa Kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	500.000.000	500.000.000	452.218.000	90,4	
							3 Studi penyusunan Kompetensi Inti Daerah (KID)	600.000.000	600.000.000	522.158.120	87,0	
							4 Studi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan karst	600.000.000	600.000.000	583.738.650	97,3	
							5 Penyusunan naskah akademis dan Raperda	800.000.000	650.000.000	636.579.400	97,9	
							<b>C Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>					
							1 Evaluasi capaian indikator dan target MDGs Kab Kutai Timur	500.000.000	500.000.000	489.907.950	98,0	
							2 Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	944.659.050	94,5	
							3 Pendataan penduduk miskin berdasarkan indikator spesifik lokal (database by name by address)	960.000.000	960.000.000	916.343.110	95,5	
							<b>D Program Perencanaan Tata Ruang</b>					
							1 Penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis	1.000.000.000	950.000.000	867.963.610	91,4	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program / Kegiatan	Anggaran			
				Target	Realisasi	% Capaian		Pagu APBD	Pagu P-APBD	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.3	Terwujudnya efektivitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana	1. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi:									
		# Rapat Koordinasi Bidang Fisik Prasarana	kali	4	17	100					
		# Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi	kali	4	5	100					
		# Rapat Koordinasi Bidang Sosial Budaya	kali	4	8	100					
		# Rapat Koordinasi Bidang Pendataan Pelaporan	kali	4	8	100					
		2. Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan	Dilaksanakan	100					
							<b>A Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				
							1 Koordinasi Pengendalian kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBD, APBD Provinsi dan APBN	350.000.000	290.000.000	171.147.960	59,0
							2 Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan	358.000.000	730.223.400	693.683.660	95,0
							<b>B Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>				
							1 Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang ekonomi	500.000.000	500.000.000	462.906.522	92,6
							<b>C Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>				
							1 Koordinasi perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan bid. Sosial budaya	900.000.000	580.000.000	503.353.346	86,8
							<b>D Program Perencanaan Tata Ruang</b>				
							1 Koordinasi tentang rencana tata ruang	450.000.000	450.000.000	371.405.100	82,5
							2 Rapat Koordinasi Infrastruktur	250.000.000	250.000.000	218.839.780	87,5
							3 Koordinasi pengelolaan Daerah Aliran sungai (DAS) Kabupaten Kutai Timur	250.000.000	250.000.000	128.557.370	51,4
							4 Sosialisasi rencana tata ruang kabupaten	350.000.000	225.000.000	41.069.950	18,3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program / Kegiatan	Anggaran			
				Target	Realisasi	% Capaian		Pagu APBD	Pagu P-APBD	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3											
3.1	Terwujudnya pengembangan dan pemantapan Sistem Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsif	1. Frekuensi monitoring dan pengendalian 2. Tahapan Proses perencanaan pembangunan daerah :	%	100	45	45					
		# Forum Gab. SKPD	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan	Dilaksanakan	100					
		# Musrenbang Kab.	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan	Dilaksanakan	100					
							<b>A Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				
							1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	500.000.000	500.000.000	236.536.900	47,3
							2 Forum Gabungan SKPD	340.000.000	269.406.950	263.831.950	97,9
							3 Penyelenggaraan Musrenbang dan penyusunan RKPD	930.000.000	893.905.250	874.081.550	97,8
3.2	Terlaksananya sistem pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang ditentukan	1. Tersedianya dokumen laporan :									
		# LKPJ	Ada/ Tidak	Ada	Ada	100					
		# Lakip Bappeda	Ada/ Tidak	Ada	Ada	100					
		# Lakip Pemkab Kutim	Ada/ Tidak	Ada	Ada	100					
							<b>A Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
							1 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [LAKIP] SKPD	50.000.000	42.439.500	42.439.500	100,0
							2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	150.000.000	150.000.000	137.201.300	91,5
							<b>B Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				
							1 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	300.000.000	300.000.000	242.926.420	81,0
							2 Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban [LKPJ]	600.000.000	590.592.880	448.628.880	76,0
	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>							<b>22.888.000.000</b>	<b>22.888.000.000</b>	<b>20.571.606.295</b>	<b>89,88</b>

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 20 November 2014.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 menggambarkan kinerja sasaran yang akan dicapai selama dari kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk Tahun 2014 terdapat 48 Kegiatan, dalam 10 Program dan 13 Indikator Kinerja yang merupakan bagian dari 6 Sasaran Strategis.

Berdasarkan analisis capaian kinerja target dan realisasi tahun 2014 mencapai nilai rata-rata **96,7%**. Menurut standart Lembaga Administrasi Negara (LAN) nilai capaian Kinerja Sasarannya termasuk dalam kategori **“AA (Memuaskan)”**. sedangkan berdasarkan realisasi anggaran BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur tahun 2014 dengan rata-rata realisasi keuangan **89,88 %**.

### 4.2. Saran

Besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.